

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : IV
Rapat ke- : 11
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pengembangan Sawit Rakyat dengan:
1. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian; dan
2. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Selasa, 30 Maret 2021
Waktu : 14.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.

Acara : Membahas Pengembangan Peremajaan Kelapa Sawit.
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) didampingi oleh G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-Gerindra) dan Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-NasDem)

Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 21 Anggota dari 28 Anggota Panja
B. Hadir:
1. Dr. Ir. Kasdi Subagyono, M.Sc. (Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian); dan
2. Eddy Abdurrachman (Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit).

I. PENDAHULUAN

RDP Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pengembangan Sawit Rakyat dengan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit membahas Pengembangan Peremajaan Kelapa Sawit, dibuka pukul 14.30 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI meminta kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk segera merealisasikan penyaluran dana peremajaan kelapa sawit kepada petani peserta peremajaan berdasarkan persyaratan yang sesuai dengan hasil rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta agar penyaluran dana peremajaan diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah rekomendasi teknis disampaikan kepada BPDPKS.
2. Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah mempertimbangkan untuk menunjuk kelembagaan yang memiliki kapasitas memadai seperti asosiasi bidang perkelapasawitan dalam rangka pendampingan petani calon peserta peremajaan sehingga realisasi peremajaan dapat tercapai sesuai dengan target.
3. Komisi IV DPR RI sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam pengawasan dan penganggaran, meminta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk menyerahkan data dan dasar pertimbangan alokasi anggaran dana pungutan ekspor kelapa sawit. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan kajian terhadap pengalokasian dana pungutan ekspor kelapa sawit untuk Peremajaan Sawit Rakyat dan data tersebut agar dapat diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Rapat Panja ini.
4. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Pertanian dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit agar sosialisasi terhadap target sasaran Peremajaan Sawit Rakyat. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI bersama dengan Kementerian Pertanian dan BPDPKS akan melakukan koordinasi dan sosialisasi program Peremajaan Sawit Rakyat.
5. Komisi IV DPR RI meminta kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk menyerahkan data Perusahaan penerima dana pungutan sawit yang digunakan untuk pengembangan Biodiesel sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020. Selanjutnya, data tersebut agar diserahkan 2 (dua) hari setelah Rapat Panja ini.

6. Komisi IV DPR RI akan melakukan kunjungan kerja Panja mengenai Pengembangan Sawit Rakyat untuk melihat langsung pelaksanaan Peremajaan Sawit Rakyat dan Perusahaan pengelola Biodiesel yang menggunakan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.05 WIB.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.
A-151

Direktur Jenderal Perkebunan
Kementerian Pertanian,

Ttd.

Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc.

Direktur Utama Badan Pengelola
Dana Perkebunan Kelapa Sawit,

Ttd.

Eddy Abdurrachman